**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RU-
MAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

Sartika Dewi
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Email: sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Pengertian KDRT dalam UU No 23/2004 PKDRT “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau pemerasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengertian dari KDRT dan bagaimana Perlindungan Hukum korban KDRT. Metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dampak yang diakibatkan karena KDRT berimbas pada kesehatan dan kebahagiaan individu yang berefek pada kesejahteraan perempuan dalam komunitas. Dampak perempuan yang mengalami kekerasan menunjukkan adanya yang serius pada kesehatan perempuan. Segala bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami baik secara fisik maupun psikis dapat berdampak serius bagi kesehatan seorang perempuan.

Kata Kunci : KDRT, PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya, justru banyak

rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan.

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya. Selain itu juga, menurut Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan

rumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

KDRT masih menyisakan permasalahan walaupun undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PKDRT) telah ditetapkan. Meningkatnya angka yang dilaporkan tidak diimbangi dengan penyelesaian yang diharapkan. Catatan yang berhasil dihimpun oleh KOMNAS Perempuan sejak tahun 2009-2011 menunjukkan peningkatan pelaporan adalah sebanyak lima kali lipat. Sebelum adanya UU PKDRT yaitu rentang 2005-2008 jumlah yang dilaporkan adalah sebanyak 19.572 kasus, sejak berlakunya UU PKDRT, 2009-2011 terhimpun sebanyak 63.824 kasus.

Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resor Karawang mencatat jumlah data KDRT unit IV PPA SAT RESKIM periode 2012 s/d 2014 : tahun 2012, kekerasan fisik 37 kasus, penelantaran 6 jumlah 43 kasus. Tahun 2013, kekerasan fisik 56 kasus, penelantaran 2 jumlah 58 kasus. Tahun 2014 kekerasan fisik 51 penelantaran 2 jumlah 53 kasus. Total keseluruhan kekerasan fisik berjumlah 144 dan penelantaran berjumlah 10 kasus total semuanya 154 kasus.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam praktiknya sulit diungkap karena beberapa sebab. Pertama, KDRT terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi).

Kedua, pada umumnya korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutupi tindakan kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan tersebut dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipermasalahkan.

Perilaku atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat pula dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ruang lingkup domestik ini berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Dalam kaitan dengan KDRT tersebut di atas secara umum dapat dijelaskan bahwa HAM merupakan bagian integral dari HAM

secara umum. Penjelasan ini sesuai dengan Pasal 14 dalam Deklarasi Beijing “*hak asasi kaum perempuan adalah Hak Asasi Manusia*”² hak asasi manusia perempuan dan anak-anak perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan secara utuh dan tak dapat dibagi-bagi dari HAM secara umum.³ Dan perlakuan yang adil terhadap HAM merupakan tanggung jawab bersama masyarakat Internasional.

Berbicara mengenai HAM, dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Dan setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan.

Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan, seperti yang diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Melalui instrumen hukum perdata, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, maka pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dikenakan hukuman karena penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Sepanjang pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak merasa dirugikan dengan adanya KDRT maka tidak akan muncul gugatan ke pengadilan. Berbeda dengan menggunakan hukum publik yang memiliki sifat apabila terjadi pelanggaran hukum, penegakan hukumnya dilakukan oleh penguasa karena tujuan hukum publik adalah menjaga kepentingan umum.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁴ Undang-Undang ini antara lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan ataupun kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga.

Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan membentuk rumah tangga/keluarga adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila rumah tangga bahagia, maka lingkungan masyarakat dan bangsa tertentu bahagia serta menjadi aman damai. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan undang-undang dimaksud merupakan suatu keharusan.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang PKDRT, bentuk kekerasan rumah tangga diatur dalam Pasal 5, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang dapat dimediasi batasannya hanya kekerasan yang merupakan delik aduan (Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53), serta dampak kekerasan yang dialami istri (Pasal 44 ayat (4)) UU no 23 Tahun 2004.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan?

TUJUAN KHUSUS

Dilihat dari permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini menjelaskan tentang KDRT dan lebih mentitik beratkan terhadap perlindungan hukum bagi korban KDRT, yang mana dari tindakan KDRT tersebut dapat menimbulkan faktor kesehatan terutama faktor kesehatan Reproduksi terhadap Perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian adalah sifat/karakteristik khusus atau kekhasan dari suatu penelitian, dalam hal ini yaitu penelitian hukum. Dalam penelitian hukum, hukum memiliki sifat/karakteristik khusus atau kekhasan, yaitu sebagai suatu norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya.⁵

Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat data dan sumber data. Berdasarkan sifatnya, dapat diklasifikasikan menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya, data dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu data primer dan data sekunder dan yang berdasarkan sifatnya adalah data kualitatif.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan mengelola secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen yang

berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder, diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Data dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan per undang-undangan. Normative karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Rumah tangga, menurut KBBI adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah dan berkenaan dengan keluarga. Keluarga adalah bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 adalah meliputi: suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang se-

bagaimana dimaksud, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dimana orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Defenisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993). Pasal 1 dari Deklarasi menyatakan: Kekerasan terhadap perempuan adalah “ setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”. Pasal 2 dari Deklarasi menyatakan : “ Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kekerasan yang

berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya”.⁶ Dengan demikian, ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga (keluarga), di masyarakat luas (tempat publik) serta yang di wilayah negara. Landasan hukum perumusan ini adalah Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) dan dikuatkan oleh Rekomendasi Umum CEDAW (*Convention on the Elimination of all Discrimination Against Women*) No. 19/1992 tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam usulan rancangan undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disusun oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada Deklarasi di atas, pengertian kekerasan dalam rumah tangga

dirumuskan sebagai: “ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi didalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orangtua, serangan seksual, atau perkosaan oleh anggota keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*).

Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Jenis tindak kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian hubungan dengan seorang laki-laki, tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan domestik dan kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul akibat pemosisian perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya kemudian suaminya. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk sekaligus dilembagakan secara sosial. Dalam hal ini, masyarakat menentukan batas-batas kepantasan dan melabelkan peran-peran stereotip bagi laki-laki dan perempuan. Apa yang ditentukan oleh masyarakat ini sudah berjalan berabad-abad lamanya, dan dianggap kodrat yang tidak bisa berubah, oleh sebab itu seseorang hanya bisa eksis dan dianggap benar apabila mengikuti batas-batas dan label-label sosial yang berlaku. Sebaliknya, seseorang akan merasa bersalah dan dipersalahkan apabila keluar dari batas-batas dan label-label sosial tersebut.

Salah satu bukti adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender adalah banyaknya perempuan yang mengalami tindakan kekerasan. Kenyataan ini disebabkan oleh kurangnya penghargaan dan adan-

ya batas-batas kepantasan yang diperlakukan secara diskriminatif terhadap perempuan sehingga perempuan dipandang tidak lebih dari sekedar objek yang pantas diperlakukan sewenang-wenang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.
- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang, dan atau membiarkan korban

bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga.

- e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya (seperti diantaranya: larangan keluar rumah, larangan berkomunikasi dengan orang lain).⁷

KDRT Dalam Islam

Pemukulan terhadap istri dalam masyarakat patriarkhis selalu dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan lumrah. Bahkan oleh sebagian masyarakat pemukulan terhadap istri hampir selalu diterjemahkan sebagai bentuk pengajaran suami terhadap istri dalam rangka pembinaan rumah tangga. Dan yang lebih parahnya lagi masyarakat sering melegitimasi kekerasan tersebut dengan dalih agama.

Islam tidak pernah membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Karena Islam adalah agama yang mempunyai nilai-nilai prinsipil seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan. Berikut ini ayat-ayat Alqur-an dan hadis nabi yang mengharuskan suami untuk berlaku sopan, penyayang dan lemah lembut kepada istrinya :

- a. Dalam Surat An-nisa:19 yang menyatakan :

tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

- b. Dalam surat Ar-rum:21

diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT

Dalam UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pengertian dari kesehatan adalah “ kesehatan adalah keadaan sehat, baik, secara fisik, mental, spriritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Kesehatan reproduksi menurut ICPD (1994) adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.

Diilihat dari sudut aspek kesehatan, kasus KDRT yang berdampak terhadap kesehatan terutama kesehatan Reproduksi yang berdampak serius bagi perempuan. Dengan menggunakan mediasi yang mengacu terhadap UU Kesehatan tersebut maka hak-hak reproduksi perempuan dapat terpenuhi, karena dengan melihat hak reproduksi perempuan maka para pelaku (suami) dapat bersikap lebih bijak dan bertanggungjawab terhadap korban (istri).⁸Hal tersebut tercantum dalam UU Kesehatan No 36 tahun 2009 bagian keenam tentang Kesehatan Reoroduksi

Pasal 71 “kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan social secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan system, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan”.

Pasal 72 “ setiap orang berhak : menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi,

paksaan, dan atau/ kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama”.

Sehubungan dengan dampak tindak kekerasan terhadap kehidupan seksual dan reproduksi perempuan, penelitian yang dilakukan oleh Rance (1994) yang dikutip oleh Heise, Moore dan Toubia (1995) kekerasan dan dominasi laki-laki dapat membatasi dan membentuk kehidupan seksual dan reproduksi perempuan. Selain itu, laki-laki juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tentang alat kontrasepsi yang dipakai oleh pasangannya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan di Norwegia oleh Schei dan Bakketeig (1989) yang dikutip oleh Heise, Moore dan Toubia (1995) juga menyatakan bahwa perempuan yang tinggal dengan pasangan yang suka melakukan tindak kekerasan menunjukkan masalah-masalah ginekologis yang lebih berat ketimbang dengan yang tinggal dengan pasangan/suami normal ; bahkan problem ginekologis ini bisa berlanjut dalam rasa sakit terus menerus.

Tindak kekerasan terhadap istri perlu diungkap untuk mencari alternative pemberdayaan bagi istri agar terhindar dari tindak kekerasan yang tidak semestinya terjadi demi terwujudnya hak perempuan untuk memperoleh kesehatan reproduksi yang sehat.

Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi seperti menorrhagia, hipomenorrhagia atau metrorrhagia bahkan wanita dapat mengalami menopause lebih awal, dapat mengalami penurunan libido, ketidakmampuan mendapatkan orgasme, akibat tindak kekerasan yang dialaminya.

Di seluruh dunia satu diantara empat perempuan hamil mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangannya. Pada saat hamil, dapat terjadi keguguran / abortus, persalinan imatur dan bayi meninggal dalam rahim. Pada saat bersalin, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan. Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan Bayi Berat Lahir Rendah, terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga.

Sehubungan dengan ajaran Islam, pada UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 72 menyatakan bahwa setiap orang harus memperlakukan orang lain dengan tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Di dalam islam KDRT sangat dilarang dan telah terdapat firman Allah dan hadist nabi yang melarang

suami melakukan kekerasan/KDRT kepada istrinya. Hukum islam yang hidup dalam kesadaran masyarakat muslim di dunia ini, termasuk yang telah menjadi hukum positif dalam perundang-undangan yang berlaku di negara-negara muslim, sebenarnya adalah “fiqh”. Sebagian besar dari pandangan fiqh ini berasal dari pandangan ijtihad empat madzhab terbesar; hanafi, maliki, syafi’i dan hanbali. Menjawab masalah KDRT melalui kaca mata agama islam adalah dengan implementasi hukum-hukum islam “fiqh”, khususnya yang terkait dengan aturan dan ketentuan berumah tangga secara proporsional, benar dan kontekstual. Fenomena salah kaprah dalam mengimplementasikan hukum-hukum agama islam perlu diluruskan, diproposionalkan dan disosialisasikan sehingga KDRT yang dilakukan sebagai orang dengan dalil agama dapat dikurangi, salah satunya dengan menggunakan mediasi penal dalam kasus-kasus KDRT dapat mengurangi jumlah kasus KDRT di Indonesia. Sejalan dengan UU PKDRT pasal 24 “Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban”.

UU yang mengatur tentang kasus KDRT ini dimaksud memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman alternative kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih

menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP

UU No 23 tahun 2004 PKDRT pasal 44 “Ketentuan Pidana”

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima jutarupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis atau bahkan korban meninggal dunia. Sebagai UU yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, untuk itu perlu upaya strategis diluar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menyimpannya.

Pasal 16 tentang Perlindungan :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Perjuangan penghapusan KDRT berangkat dari fakta banyaknya kasus KDRT yang terjadi dengan korban mayoritas perempuan dan anak-anak. Hal ini berdasarkan sejumlah temuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan.

Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggar kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinahan yang malah dibiarkan, dan lain lain.

Dari sisi sosial budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berperilaku dan seks bebas, telah menumbuh-suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme dan hubungan seks disertai kekerasan.

Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidak-pahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat. dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilakupun berada pada derajat sangat rendah. Untuk persoalan ini, dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh

oleh negara. Kalau tidak akan terjadi ketimpangan.

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi perempuan korban KDRT diantara beberapa lembaga yang terlibat yakni pertama, *Women Crisis Center (WCC)* atau organisasi perempuan penyedia layanan. Setidaknya ada delapan macam pelayanan yang biasa diberikan WCC adalah hotline, layanan konseling, support group, pendamping hukum, penyediaan rumah aman atau shelter, terapi psikologis, pelayanan media dan penguatan ekonomi. Kedua, Rumah sakit, peran aktif RS dalam memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan dikembangkan oleh Komnas Perempuan dan RSCM Jakarta. Yang kemudian diadopsi diberbagai lembaga kesehatan lainnya. Ketiga, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) adalah tindak lanjut dari Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dibentuk sejak tahun 1999 di Kepolisian, saat UUPA menjadi unit tersendiri dalam struktur kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri No 10/2007. Dan terakhir keempat, kejaksaan yang mengalokasikan dana secara rutin untuk menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) lembaga ini juga menginterpretasikan jender sebagai salah satu bidang pendidikan yang diajarkan kepada aparatnya.

PENUTUP

Menurut pasal 11 UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut pasal 12 ayat (1) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, nyatanya, sosialisasi dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga masih minim. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apalagi memahami UU PKDRT, bahkan di kalangan aparat penegak hukum masih timbul berbagai persepsi pengertian KDRT.

Di samping itu, diperlukan sosialisasi yang memadai bagi masyarakat luas, terutama bagi para pihak yang berpotensi melakukan KDRT, sebagai upaya pencegahan. Bagi pihak yang mungkin menjadi korban KDRT, sosialisasi perlu, agar bila terjadi KDRT, ia dapat memperbaiki nasibnya karena telah mengetahui hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi kedua, Akademika Pressindo, Jakarta:2003
- Dep. Kes. RI. *Profil Kesehatan Reproduksi Indonesia 2009*. Jakarta: Dep.Kes. RI
- Franz Magins Suseno, *Etika Politik dan Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Mulyana W Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung:1990

Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Walisongo Mediation Center, Semarang:2007.

Mulyana W Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung:2000.

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2009

Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, refika Aditama, Bandung:2008.

Nolan Haley, *Alternative Dispute Resulation*, St. Paull: West Publishing Co, USA, 1992.

Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT.Alumni, Bandung:2006.

Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta:2004

Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung:2006.

Ridawan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006.

Sagung Putri, *Viktimasi Kriminal Terhadap Perempuan*, dalam kerta partika, Jakarta, 2008.

Sarwono Prawirohadjo, *Buku Panduan Pelayanan Maternal dan Neonatal*, YSP:2008.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Undang-undang no 1 tahun 1997 tentang Perkawinan

SUMBER LAIN

KOMNAS Perempuan, *Peta Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, Jakarta, 2000.